

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kriminalitas atau kejahatan merupakan bagian dari masalah sosial yang terjadi di kehidupan bermasyarakat sehari-hari. Kejahatan sangat mudah dirasakan oleh masyarakat serta mudah nampak karena kejahatan merupakan hal yang merugikan dan meresahkan baik bagi si pelaku dan masyarakat. Bentuk kerugiannya berupa material dan moral. Kerugian material adalah kerugian yang terjadi pada korban-korban yang mengalami kejahatan sedangkan kerugian moral berupa meningkatnya kejahatan yang berdampak pada menurunnya kepercayaan masyarakat (Abdulsyani, 1987). Tindakan kejahatan atau kriminalitas yang dilakukan individu ini akan menimbulkan keresahan di masyarakat karena ancaman kejahatan yang membuat kerugian. Kerugian pada korban merupakan dampak kejahatan yang paling dirasakan dan menyebabkan sebuah trauma kepada korban, sehingga dapat memunculkan rasa benci kepada pelaku kejahatan.

Seorang individu yang melakukan tindakan kejahatan atau kriminalitas setelah melalui proses persidangan dan divonis oleh hakim, selanjutnya menjalani pembinaan di lembaga pemasyarakatan (LAPAS) sesuai dengan masa pidana. Individu yang menjalani masa hukuman di dalam lembaga pemasyarakatan disebut dengan warga binaan pemasyarakatan atau yang disingkat dengan WBP. Menurut UU RI No.12 Tahun 1995 warga binaan pemasyarakatan adalah narapidana, anak didik pemasyarakatan dan klien pemasyarakatan.

Klien pemasyarakatan adalah seorang narapidana yang sudah menjalani 2/3 masa pidana, yang kemudian dimasyarakatkan kembali melalui mekanisme Pembebasan Bersyarat (PB) dan Cuti Menjelang Bebas (CMB), dibawah bimbingan dan pengawasan Balai Pemasyarakatan (BAPAS). Narapidana yang mendapatkan mekanisme PB yaitu narapidana yang divonis hukuman diatas satu setengah tahun, sedangkan narapidana yang mendapatkan mekanisme CMB yaitu narapidana yang divonis hukuman dibawah satu setengah tahun. Pembimbingan yang dilakukan oleh BAPAS bertujuan agar klien pemasyarakatan menjalani hubungan baik dengan masyarakat, memiliki rasa bertanggung jawab, memberikan motivasi untuk berkelakuan baik untuk tidak mengulangi kriminalitas lagi. Jadi ketika klien pemasyarakatan mendapatkan Cuti Bersyarat dan Pembebasan Bersyarat untuk pembinaan di luar LAPAS akan diserahkan kepada BAPAS.

Mekanisme persyaratan klien pemasyarakatan mendapatkan Cuti Menjelang Bebas (CMB) atau Pembebasan Bersyarat (PB) yaitu memenuhi syarat substantif dan administratif. Syarat substantif berupa catatan berkelakuan baik selama berada di dalam LAPAS dan telah menjalani 2/3 dari jumlah masa pidana, kemudian syarat administratif berupa penelitian kemasyarakatan yang dilakukan oleh Pembimbing kemasyarakatan (PK) BAPAS. Sebelum klien kembali pulang dan berkumpul bersama keluarga, terlebih dahulu Pembimbing Kemasyarakatan (PK) BAPAS melakukan kunjungan ke rumah klien (*Home visit*) untuk melakukan penelitian kemasyarakatan (Litmas). Penelitian Kemasyarakatan (Litmas) bertujuan untuk meneliti identitas klien, keluarga klien dan penjamin, tanggapan dari keluarga dan masyarakat, serta kemungkinan timbulnya permasalahan sebelum narapidana yang

diusulkan disetujui untuk mendapatkan pembebasan bersyarat (PB). Pembimbing Kemasyarakatan (PK) juga memberikan bimbingan penyuluhan kepada keluarga, masyarakat sekitar tempat klien menjalani pembinaan dan aparat pemerintah setempat, dengan tujuan agar berpartisipasi dalam proses penerimaan klien pemasyarakatan di lingkungan masyarakat. Partisipasi masyarakat dan aparat setempat dibutuhkan dalam proses klien kembali ke lingkungannya, karena klien pemasyarakatan sudah ada dan berkehidupan ditengah-tengah masyarakat.

Balai Pemasyarakatan atau yang disingkat BAPAS adalah salah satu pranata unit kementerian hukum dan HAM RI untuk melaksanakan bimbingan klien pemasyarakatan (UU RI No. 12 tahun 1995 tentang pemasyarakatan). Balai pemasyarakatan atau BAPAS sebagai lembaga penyeimbang proses peradilan dan proses pemasyarakatan memiliki fungsi menentukan program layanan, menjaga kontinuitas program reintegrasi, mengintegrasikan program dan koordinasikan program. Terpidana atau narapidana telah menjalani dua pertiga dari lamanya pidana penjara yang dijatuhkan, maka akan diberikan pelepasan bersyarat dengan syarat tertentu (Pasal 15 KUHP). Pelepasan atau pembebasan bersyarat merupakan program pembinaan klien pemasyarakatan untuk kembali ke lingkungan masyarakat. Warga binaan pemasyarakatan yang disetujui pembebasan bersyarat berdasarkan surat keputusan Menteri Hukum dan HAM RI selanjutnya diserahkan kepada Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Klas I Malang dengan berita acara serah terima.

Wilayah kerja BAPAS Klas 1 Kota Malang meliputi Malang, Bangil, Pasuruan, Probolinggo, Kraksaan dan Lumajang dengan jumlah keseluruhan klien pemasyarakatan dibawah bimbingan BAPAS Klas 1 Malang berjumlah 1889 klien

pemasyarakatan (Laporan Bulanan Data Bulan April BAPAS klas 1 Malang).Dipilihnya BAPAS Kota Malang karena Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Karangploso Kabupaten Malang yang berada di wilayah kerja BAPAS Kota Malang.

(Tabel 1 Data kasus tindak kejahatan klien pemasyarakatan di Kecamatan Karangploso)

Tindakan Kriminalitas	Jumlah Klien Pemasyarakatan
Narkoba	13
Penganiayaan	1
Perlindungan anak	4
Pencurian dengan kekerasan	2
KDRT	1
Sajam	1
Penadahan	1
Penggelapan	1
Perminyakan	1
Jumlah	26

Sumber : Dokumen Pribadi BAPAS Malang

Kabupaten Malang merupakan salah satu wilayah kerja dari Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Klas I Malang. Menurut data dari Balai Pemasyarakatan Klas I Malang jumlah klien pemasyarakatan di Kabupaten Malang yaitu 949 orang yang terbagi dalam 33 kecamatan, dengan Kecamatan Karangploso yang merupakan

kecamatan yang memiliki jumlah klien terbanyak yaitu 26 orang (Laporan Bulanan jumlah Klien BAPAS Klas I Malang Per November 2016).

Kehidupan setelah berada di luar LAPAS merupakan kehidupan yang ditunggu oleh klien pemasyarakatan setelah menjalani masa hukuman di dalam LAPAS untuk kembali berkumpul bersama keluarga dan berinteraksi dengan masyarakat tempat di mana klien pemasyarakatan berdomisili. Menjalinkan hubungan kembali dengan masyarakat yang terputus karena klien pemasyarakatan menjalani masa hukuman di dalam LAPAS serta membangun kembali peran dan status dengan lingkungan serta mencari pekerjaan.

Kembalinya klien di lingkungan sosialnya tidaklah mudah dan membutuhkan waktu yang cukup lama untuk memulihkan kembali hubungan dengan masyarakat serta membangun kembali status, peran dan kepercayaan masyarakat dengan klien pemasyarakatan. Klien pemasyarakatan memiliki harapan setelah berada di luar LAPAS dapat kembali bersosialisasi dan menjalani kehidupan dengan baik. Selama klien pemasyarakatan berada di dalam Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) tidak mendapatkan kebebasan dan kehidupannya diatur oleh LAPAS. Akibatnya klien pemasyarakatan memiliki kepercayaan diri yang rendah karena dibatasi oleh aturan-aturan yang harus dipatuhi. Kondisi klien pemasyarakatan saat berada di dalam LAPAS sangat berbeda dengan kondisi masyarakat di luar LAPAS yang memiliki kebebasan.

Pemberian julukan, cap atau labelling diberikan oleh masyarakat kepada individu dari akibat melakukan perilaku menyimpang. Kasus kejahatan yang

Dilakukan oleh klien pemasyarakatan memiliki dampak ketika kasus tersebut adanya korban kejahatan seperti kasus pembunuhan, perampokan dan perlindungan anak. Dampak yang dirasakan klien pemasyarakatan setelah berada di luar LAPAS atau kembali ke rumah, yaitu pemberian cap atau labelling kepada klien pemasyarakatan yang melakukan penyimpangan tindak pidana kejahatan yang sewaktu- waktu akan mengulangi kejahatan kembali. Pemberian labeling merupakan reaksi dari dilanggarnya norma, bagaimana seseorang dicap dengan label penyimpangan atau criminal. Pemberian labeling bukan hanya dirasakan oleh klien pemasyarakatan saja, namun juga dirasakan oleh keluarga klien pemasyarakatan artinya masyarakat sekitar akan menjauhi klien pemasyarakatan beserta keluarganya. Hal tersebut berdampak pada psikologi klien dan keluarga seperti menjadi buah bibir masyarakat dan dikucilkan akibatnya akan mendapatkan diskriminasi di lingkungan sosialnya. Label yang diberikan masyarakat kepada klien berbeda- beda. Labeling klien dengan kasus perampokan yaitu bersifat kasar, panjang tangan, emosional dan ugalan-ugalan sedangkan pada klien kasus perlindungan anak yaitu memiliki kelainan mental.

Pandangan buruk penuh curiga dari masyarakat menyebabkan klien pemasyarakatan menjadi canggung dan sulit berbaur. Setiap klien yang ingin terlibat dalam kegiatan warga selalu mendapat celaan dan cemooh dari masyarakat. Hal tersebut akan menimbulkan rasa pesimis dari klien pemasyarakatan. Rasa tersebut akan membawa klien pemasyarakatan melakukan tindak kriminalitas kembali karena merasa ditolak oleh masyarakat. Kesulitan – kesulitan yang sering dihadapi bukan hanya saat klien pemasyarakatan ingin kembali berbaur dengan masyarakat sekitar, namun disaat klien ingin mencari pekerjaan guna menghidupi kebutuhan sehari- hari

dan mengembalikan kepercayaan dari masyarakat sekitarnya. Masalah yang muncul pada saat kembalinya klien pemasyarakatan di lingkungan sosialnya bukan hanya disebabkan dari factor luar klien namun juga tekanan- tekanan dari dalam diri klien pemasyarakatan khususnya bagi klien yang telah memiliki keluarga untuk bertanggung jawab dari segi moral dan ekonomi. Masyarakat memandang negatif klien pemasyarakatan sebagai narapidana yang melakukan kejahatan. Klien pemasyarakatan dianggap sebagai pembuat kerusuhan di masyarakat yang memberikan keresahan.

Dari hasil observasi peneliti yang dilakukan pada tanggal 21 April 2017 kepada beberapa klien pemasyarakatan dengan kasus narkoba, kasus percurian dengan kekerasan (perampokan) dan perlindungan anak, mendapatkan respon masyarakat yang berbeda-beda ketika klien pemasyarakatan ke luar dari LAPAS dan kembali ke lingkungan. Untuk klien dengan kasus narkoba bernama YN dan HS respon dari masyarakat yaitu tidak ada permasalahan artinya masyarakat bias menerima kembali seperti sebelum mereka terlibat tindak pidana. Hal ini disebabkan tindak pidana yang dilakukan tidak ada korbannya. Perubahan yang terjadi pada diri klien pemasyarakatan kasus narkoba, klien menjadi lebih taat beribadah dan lebih berbaur dengan masyarakat untuk berpartisipasi dalam kegiatan warga.

Klien pemasyarakatan dengan kasus perampokan dengan kekerasan (perampokan) bernama RW, tanggapan masyarakat ketika klien ke luar dan kembali ke lingkungan mendapatkan respon yang negatif, karena kasusnya perampokan dengan kekerasan terdapat korban hingga membuat trauma. Respon masyarakat pertama kali klien berada di lingkungannya untuk kembali ke rumah yaitu pemberian labeling

berupa julukan “perampok” dan klien kesulitan untuk berbaur dengan masyarakat dan mencari pekerjaan. Sebelum melakukan kejahatan kasus perampokan dengan kekerasan, klien memiliki pekerjaan berwiraswasta membuka usaha bengkel servis sepeda motor, namun ketika melakukan kejahatan kemudian klien masuk ke LAPAS dan menjalani hukuman, usaha tersebut lama-kelamaan menjadi gulung tikar.

Pemberian labeling tersebut bukan hanya dirasakan oleh klien pemasyarakatan namun dirasakan juga oleh keluarga klien. Bagi klien kasus perampokan dengan kekerasan sampai saat ini masih kesulitan untuk mencari pekerjaan. Awalnya setelah keluar dari LAPAS klien mempunyai inisiatif untuk berwiraswasta membuat makanan ikan lele, setelah usaha tersebut berjalan 5 bulan kemudian klien memperbesar usahanya dan meminta bantuan kepada dinas perikanan dan pemerintahan Kecamatan Karangploso mendapat penolakan karena status klien yang menjadi narapidana. Ketakutan dan kecemasan masyarakat kepada klien yang sewaktu-waktu mengulangi kejahatan kembali merupakan faktor penghambat proses kembalinya klien. Bagi kasus perlindungan anak yang dilakukan oleh MM mendapat penolakan oleh masyarakat sekitar tempat klien tinggal. Hal tersebut disebabkan karena korban perlindungan anak yang dilakukan oleh MM letaknya persis di depan rumah klien. Sehingga klien dipindahkan ke desa lain di luar Kecamatan Karangploso dengan alasan keselamatan klien dan kondisi korban. Menurut penuturan pegawai BAPAS yang menangani kasus MM, jika klien tidak diterima di lingkungan tempat tinggal klien di Desa Ampeldenta Karangploso dapat dipindahkan di daerah lain di Desa Bocek kecamatan Karangploso dengan syarat terdapat keluarga yang menjamin dan bertanggung jawab mengenai klien.

Reaksi masyarakat terhadap persoalan kejahatan paling menyolok ketika kejahatan tersebut membuat resah. Pada situasi tersebut biasanya rasa kesejahteraan dan ketentraman menjadi terganggu. Reaksi masyarakat terhadap keberadaan klien pemasyarakatan seharusnya bisa diterima kembali karena klien telah mendapatkan hukuman dan menjalani pidananya di dalam LAPAS, namun nyatanya ketika klien kembali ke lingkungannya terdapat penolakan- penolakan ketika kasus yang diperbuat klien merugikan korban. Hal tersebut mengibaratkan bahwa hukum masyarakat lebih kejam dari pada hukum pidana.

Klien pemasyarakatan merupakan individu bagian dari masyarakat yang memiliki hak dan kewajiban untuk menjalani kehidupannya, namun karena klien pemasyarakatan melakukan penyimpangan tindakan kriminalitas dan menjalani masa hukuman di dalam LAPAS menyebabkan klien mendapatkan stigma dari masyarakat sebagai narapidana pelaku kriminalitas. Stigma memperlihatkan bahwa individu yang memiliki atribut-atribut adalah seorang buruh, criminal dan penghianat (Goffman, 1963). Stigma yang melekat pada klien pemasyarakatan mempersulit klien saat kembali ke lingkungannya. Terjadi penolakan-penolakan disaat klien kembali berbaur dengan masyarakat seperti dikucilkan, dijauhi dan tidak dianggap keberadaanya.

Klien pemasyarakatan merupakan makhluk sosial yang membutuhkan bantuan orang lain untuk menjalani kehidupannya dan berinteraksi dengan lingkungannya. Maka dari itu perlu adanya sebuah usaha untuk mengubah stigma yang melekat pada diri klien pemasyarakatan sebagai mantan narapidana. Orang yang terstigma seperti klien pemasyarakatan akan melakukan sebuah persiapan sebelum bertemu

dengan masyarakat. Hal tersebut untuk menciptakan kesan yang menarik di masyarakat dan membuktikan bahwa klien telah berusaha mengubah perilaku yang lebih baik, menjalankan aturan-aturan di masyarakat dan menyesali perbuatan yang dilakukannya. Maka dari itu penelitian ini memfokuskan pada usaha klien pemasyarakatan untuk mengubah stigma di masyarakat dalam proses kembalinya klien di lingkungan sosialnya dengan menggunakan Teori Dramaturgi dari Erving Goffman.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan gambaran atau uraian latar belakang permasalahan, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

- **Bagaimana usaha klien pemasyarakatan untuk mengubah stigma yang diberikan oleh masyarakat dalam proses kembalinya klien di lingkungan sosialnya ?**

1.3 Tujuan Penelitian

Mengetahui usaha klien pemasyarakatan dalam mengubah stigma yang muncul pada proses penerimaan sosial di lingkungan sosialnya.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Akademis

- Penelitian ini diharapkan dapat membantu memberikan sumbangan pengetahuan dan membuka wawasan serta pengembangan kajian keilmuan dalam ranah Sosiologi.
- Penelitian ini dapat menjadi referensi atau acuan bagi penelitian lain untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai proses penerimaan klien masyarakat di lingkungan sosialnya.

1.4.2 Manfaat Praktis

- Penelitian ini diharapkan dapat membantu mengevaluasi program pembimbingan yang dilakukan oleh BAPAS terhadap klien masyarakat dalam proses kembalinya klien di lingkungan sosial.
- Membantu memberikan sumbangan yang berarti kepada beberapa pihak sebagai tambahan informasi baik bagi pemerintah setempat dan masyarakat mengenai masyarakat di daerah kecamatan Karangploso.

